

# **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM**

## **(Studi *Turn of Voter* dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)**

### **ABSTRAK**

Tia Subekti, 2014 : Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi *Turn of Voter* dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Dosen Pembimbing : Muhtar Haboddin S.IP., M.A dan M. Lukman Hakim S.IP., M.Si.,

Penelitian ini fokus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum khususnya melihat *turn of voter* dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013. Partisipasi penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional. Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana upaya meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013?. *Kedua*, bagaimana rasionalitas masyarakat dalam partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013? Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, terdapat upaya dari KPUD, Partai Politik, Media massa, dan *civil society* dalam meningkatkan partisipasi politik. *Kedua*, rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan partisipasi politik. Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik. Namun sosok pasangan kandidat dan visi misi juga tidak bisa diabaikan dalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat.

Kata kunci: Pemilu, Partisipasi Politik, Pilihan Rasional,

## **A. PENDAHULUAN**

### **A.1 Latar Belakang**

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press, 1995. hlm. 56

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Terdapat lima alasan yang melatarbelakangi peneliti mengambil tema tentang partisipasi politik dalam Pemilu Kabupaten Magetan. *Pertama*, adanya peningkatan partisipasi politik dalam Pemilu Kabupaten Magetan tahun ini sebesar 4% bila dibandingkan dengan Pemilu Kabupaten Magetan tahun 2008. Pada Pemilu Kabupaten Magetan tahun 2013 partisipasi pemilih mampu menembus angka 72 %. Untuk lebih jelasnya peningkatan partisipasi pemilih dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**

**Peningkatan Partisipasi Pemilih Masyarakat Kabupaten Magetan**

<b>Tahun</b>	<b>Tingkat partisipasi (%)</b>
Pemilukada tahun 2008	68 %
Pemilihan legislatif tahun 2009	70%
Pemilukada tahun 2013	72%

Sumber: KPU Kabupaten Magetan, 2013

*Kedua*, sejauh ini belum banyak ditemukan penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Magetan. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian baru untuk bisa kita jadikan bahan pembelajaran ke depan terkait penelitian yang sejenis. *Ketiga*, Tahun 2013 merupakan tahun politik bagi masyarakat Kabupaten Magetan. Pada tahun 2013 masyarakat melaksanakan dua agenda Pemilu Kabupaten Magetan sekaligus yakni pemilihan bupati dan pemilihan gubernur. Tentunya perhatian masyarakat pada dunia politik cukup tinggi. Situasi ini akan sangat membantu peneliti untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi politik di Kabupaten Magetan.

*Keempat*, Kabupaten Magetan dapat dijadikan contoh partisipasi politik daerah mataraman<sup>2</sup> dalam wilayah Jawa Timur. Alasan dipilihnya Kabupaten Magetan sebagai contoh partisipasi politik mataraman karena jika dibandingkan dengan daerah lain yang masuk ke dalam wilayah mataraman Kabupaten Magetan memiliki tingkat partisipasi yang paling tinggi. Seperti yang terlihat dalam Pemiluakda Jawa Timur 29 Agustus 2013 lalu. Untuk wilayah mataraman, Kabupaten Magetan mengungguli tingkat partisipasi pemilih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**

**Partisipasi Politik Daerah Mataraman Dalam Pemiluakda Jatim**

<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah (%)</b>
Magetan	63,9
Madiun	61,6
Ponorogo	60,5
Ngawi	58

Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber

*Kelima*, tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Magetan mampu menembus angka yang menggembirakan. Tingkat partisipasi politik mencapai 72%. Bahkan angka tersebut mampu mengungguli tingkat partisipasi politik Provinsi Jawa Timur yang hanya sebesar 60%.<sup>3</sup>

Berdasarkan lima alasan yang telah dikemukakan diatas maka terdapat ruang kosong terkait belum diketahuinya upaya-upaya meningkatkan partisipasi politik dalam Pemiluakda Kabupaten Magetan tahun 2013 serta belum diketahuinya rasionalitas partisipasi politik masyarakat dalam Pemiluakda tersebut.

---

<sup>2</sup> Daerah mataraman itu sendiri merupakan daerah bekas wilayah kerajaan mataram pada masa dulu. Menurut Dwi Cahyono, sejarawan Universitas Negeri Malang yang dimaksud dengan daerah mataraman di Jawa Timur mencakup eks wilayah karisidenan Madiun dan Kediri. Wilayah tersebut terbagi menjadi mataram kulon (Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo) dan mataraman wetan (Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, blitar,). Pembagian dua wilayah mataraman berkaitan erat dengan longgarnya budaya Jawa di wilayah yang bersangkutan. Kepekaan sosio kultural mataram lebih banyak dijumpai di mataraman kulon daripada mataraman wetan. Difusi budaya mataraman di Jatim bahkan sudah dilakukan sejak era Sultan Agung dan Pangeran Diponegoro. Mataram menjadi menarik karena sejarah, nilai-nilai hidup yang dijalani beserta keseluruhan aspek budayanya. (<http://jelajahbumipapua.com/mobile/home.php?link=content-detailtulis&kode=515&jdl=Mataraman:.Komunitas.Elit.Jawa...Nusantara.di.Jawa.Timur.Bagian.Selatan> diakses pada 22 September pukul 11.13 WIB)

<sup>3</sup>Data dari KPU Kabupaten Magetan, 2013

## A.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dapat ditarik dua pertanyaan pokok, yaitu:

1. Bagaimana upaya meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilu Kabupaten Magetan tahun 2013?
2. Bagaimana rasionalitas masyarakat dalam partisipasi politik dalam Pemilu Kabupaten Magetan tahun 2013?

## A.3 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat bertujuan:

1. Mengurai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik.
2. Mengetahui rasionalitas masyarakat dalam partisipasi politik dalam Pemilu Kabupaten Magetan tahun 2013.

## B. KERANGKA TEORI

### B.1 Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.<sup>4</sup> Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>5</sup>

Dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.<sup>6</sup>

Miriam Budiardjo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).<sup>7</sup> Terakhir menurut Keith Faulks partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif.<sup>8</sup> Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka yang

---

<sup>4</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007, hlm. 140

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 367

<sup>6</sup> *Lot., cit*

<sup>7</sup> Sudijono Sastroadmojo, *op., cit.* hlm. 68

<sup>8</sup> Keith Faulks, *op. cit.* hlm. 226

dimaksud partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.<sup>9</sup> Sementara itu, Milbart dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. *Pertama*, *apatis*. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, *spectator*. Artinya, orang yang setidaknya-tidak pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, *gladiator*. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.<sup>10</sup>

## B.2 Teori Pilihan Rasional

Teori kedua yang digunakan oleh peneliti adalah teori pilihan rasional. Salah satu tokoh yang konsen terhadap teori pilihan rasional adalah James. S. Coleman. Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Coleman selanjutnya menyinggung masalah adanya aktor yang memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman. Yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan sumber daya secara rinci menuju ke tingkat sistem sosial:

Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak yang lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan. Terlibat dalam sistem tindakan, selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka.<sup>11</sup>

Berikutnya Antony Downs juga salah satu tokoh yang konsen terhadap teori pilihan rasional. Dari karya tulisan Downs, pilihan rasional berkembang dalam arah yang bervariasi. Teori pilihan rasional mengambil preferensi, keyakinan, dan strategi *feasible* individu sebagai penyebab tindakan yang mereka lakukan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Ramlan Surbakti, *op.,cit.* hlm. 142

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 143

<sup>11</sup> George Ritzer & Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana. hlm. 394

<sup>12</sup> David Marsh & Gerry Stoker. 2010. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media. hlm. 82

Varian mainstream dari pilihan rasional mengasumsikan bahwa individu mempunyai semua kapasitas rasional, waktu, dan keterikatan emosi yang penting untuk memilih arah tindakan baik, tak peduli betapa kompleksnya pilihan tersebut. Masalah paling sederhana secara konseptual dalam pembuatan keputusan parametrik dalam kepastian ketika setiap tindakan mempunyai hasil yang diketahui (sehingga tidak ada resiko atau ketidakpastian) dan hubungan antara aksi dan akibat tak dipengaruhi oleh tindakan individu lain. Individu diasumsikan mampu menilai hasil, maupun aksi. Jadi untuk pasangan manapun dari alternatif a dan b, mereka bisa mengatakan apakah a lebih baik dari b, b lebih baik dari a, atau dua hasil itu tidak berbeda. Individu rasional akan memilih satu tindakan/hasil yang paling tinggi tingkat feasibilitasnya yang tersedia bagi mereka.<sup>13</sup>

Dalam pemilihan umum menurut Downs orang memilih calon atau partai apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya yakni kehidupan ekonomi. Cukup dengan mempersepsikan keadaan ekonomi dirinya (*egosentrik*) dibawah sebuah pemerintahan (partai atau calon) tertentu sekarang ini dibanding sebelumnya (*retrospektif*), dan yang akan datang dibanding sekarang (*retrospektif*), dan yang akan datang dibanding sekarang (*prospektif*); dan evaluasi umum seorang pemilih atas keadaan ekonomi nasional (*sosiotropik*) dibawah pemerintahan sekarang dibanding tahun sebelumnya (*retrospektif*), dan keadaan ekonomi nasional dibawah pemerintahan sekarang dibanding tahun-tahun yang akan datang (*prospektif*).<sup>14</sup>

Memahami permasalahan partisipasi politik dengan melihatnya dari pandangan teori pilihan rasional. Maka peneliti merasa perlu untuk menambahkan pula teori pilihan rasional Friedmen dan Hechter. Teori ini akan melengkapi teori sebelumnya dengan menjelaskan adanya pengaruh lembaga sosial dalam pilihan rasional. Friedmen dan Hechter dalam teori yang disebutnya model kerangka teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan dan tindakanya tertuju pada upaya mencapai tujuan itu.<sup>15</sup>

Teori ini memperhatikan dua hal yang memengaruhi tindakan aktor. *Pertama*, keterbatasan sumber. Masing-masing aktor memiliki sumber yang berbeda maupun akses yang berbeda terhadap sumber tersebut. Dalam kelangkaan sumber daya terdapat gagasan mengenai biaya kesempatan. Dalam mencapai suatu tujuan, aktor harus memperhatikan biaya yang harus dikeluarkan untuk tindakan yang terpenting. Aktor dapat memilih tindakan untuk tidak mengejar tujuan paling bernilai jika sumber daya yang dimilikinya diperhitungkan tidak mencapai hal tersebut. *Kedua*, lembaga sosial. Hambatan kelembagaan menyediakan baik sanksi positif maupun sanksi negatif yang membantu mendorong aktor untuk melakukan tindakan tertentu dan menghindarkan tindakan yang lain.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 80

<sup>14</sup> Saiful Mujani, *op.,cit.* hlm. 33

<sup>15</sup> <http://perilakuorganisasi.com/teori-pertukaran-sosial-dan-pilihan-rasional-2.html> diakses pada 5 Januari 2013 pukul 11.45

<sup>16</sup> *Loc.,cit*

## C. Partisipasi Politik dalam Pemilu

### C.1 Pengaruh Lembaga Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Lembaga sosial telah berperan besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Friedmen dan Hechter yang menjelaskan adanya kemampuan dari lembaga sosial untuk memberikan sanksi positif dan negatif kepada masyarakat sehingga memengaruhi masyarakat untuk menentukan ikut berpartisipasi atau tidak. Dari penjelasan Friedmen dan Hechter tersebut dalam permasalahan partisipasi politik lembaga sosial mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam politik. Berdasarkan pengamatan peneliti, lembaga sosial yang turut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain adalah KPUD, Partai Politik, Media Massa, dan Ormas.

*Pertama*, peran KPUD. Sebagai penyelenggara Pemilu KPUD memiliki peran utama meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut termuat dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 10 menyebutkan bahwa: “Salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan sosialisasi dan penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat”.<sup>17</sup> KPUD meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui cara sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat. Cara tersebut dilakukan melalui tiga tahapan yakni melalui komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media, dan melalui mobilisasi sosial.

*Kedua*, peran Partai Politik. Partai politik dalam UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 10 disebutkan: “tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.”<sup>18</sup> Selanjutnya dalam pasal 11 dijelaskan: “partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”<sup>19</sup> Sosialisasi dan pendidikan politik oleh Partai Politik sedikitnya dilakukan dalam tiga hal, yakni: melalui sosialisasi para kader, pendidikan politik, dan melalui optimalisasi organisasi sayap partai.

*Ketiga*, peran media massa. Di era globalisasi seperti saat ini, media memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Melalui media, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih mudah. Begitu juga dalam Pemilu, media menjadi saluran komunikasi yang sangat tepat untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang netral, saat ini media menjadi salah satu lembaga yang sangat dipercayai oleh masyarakat. Dengan begitu, dalam peningkatan partisipasi masyarakat media diharapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Terdapat tiga media yang sangat efektif digunakan dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Magetan yaitu: stasiun televisi lokal JTV, radio Bagaskara FM, dan koran Jawa Pos.

---

<sup>17</sup> UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>18</sup> UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

<sup>19</sup> *Op.,cit*

*Keempat*, peran *Civil Society*. Organisasi masyarakat yang banyak bergerak dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah LSM Bangun Magetan Sejahtera dan LSM Magetan Center, Nahdatul Ulama (NU), dan Perguruan Pencak Silat Setia Hati Teratai. Keempat lembaga sosial tersebut pada intinya memiliki cara yang sama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Yakni melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan melibatkan banyak lembaga sosial tersebut diharapkan masyarakat dari berbagai elemen terdorong untuk berpartisipasi.

## **C.2 Rasionalitas Masyarakat dalam Partisipasi Politik**

Sosialisasi dan pendidikan politik yang diberikan oleh lembaga sosial dalam meningkatkan partisipasi politik ternyata tidak lantas mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi politik secara maksimal. Sehingga dalam hal ini peneliti melihat dari sisi lain mengenai pengaruh rasionalitas pemilih dalam partisipasi politik. Terlepas dari pemahaman manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu. Makhluk individu memiliki tingkat rasionalitas yang sangat tinggi. Sifat dasar dari makhluk rasional adalah kalkulasi untung rugi yang menjadi dasar setiap tindakannya. Hampir semua manusia akan berusaha mendapatkan barang yang dia inginkan dengan ongkos seminimal mungkin.<sup>20</sup> Barang dalam hal ini memiliki pengertian yang sangat luas. Tidak hanya barang yang berwujud namun juga barang yang tidak berwujud seperti misalnya sebuah kebijakan atau perjanjian. Sedangkan ongkos dalam hal ini tidak selalu berhubungan dengan uang, namun juga termasuk waktu dan tenaga.

Hubungannya dengan Pemilu, rasionalitas masyarakat muncul ketika mereka berfikir keuntungan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menggunakan hak pilihnya. Padahal disisi lain mereka sudah jelas mengeluarkan ongkos dalam Pemilu. Ongkos dalam hal ini sudah pasti tenaga dan waktu, bahkan bisa jadi uang. Misalnya untuk transportasi menuju TPS. Masyarakat mulai berfikir apakah barang yang mereka dapatkan nantinya sebanding dengan ongkos yang mereka keluarkan. Hasil Pemilu merupakan sebuah barang ketika hasil tersebut telah berubah menjadi sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun dalam hal ini apakah barang hasil Pemilu tersebut telah memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Bagi masyarakat keuntungan hanya didapat oleh calon yang terpilih, sedangkan dampak langsung bagi mereka tidak mereka dapatkan. Dalam Pemilu pada Kabupaten Magetan Tahun 2013 menunjukkan fakta adanya peningkatan partisipasi politik sebesar 4%. Peningkatan tersebut namun tidak lantas menjadi kabar bahagia bagi pemerintah khususnya atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik. Karena pada kenyataannya saat ini sangat marak berkembang fenomena politik uang atau lebih dikenal dengan istilah *money politic* dalam Pemilu.

Praktik *money politic* dalam Pemilu dapat dilihat dari pandangan teori pilihan rasional. Salah satu tokoh teori pilihan rasional yang terkenal adalah James S. Coleman. Coleman menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh tujuan dan nilai yang diinginkan oleh mereka. Selanjutnya menurut Coleman dalam teori pilihan rasional ada dua unsur yang terlibat yakni aktor dan sumber daya. Uang menjadi salah satu motivasi bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam Pemilu sendiri yang dinamakan aktor adalah masyarakat dan para calon kepala daerah. Sedangkan sumber daya yang dimaksud adalah

---

<sup>20</sup> Saiful Mujani, *op.,cit* hlm. 306

uang dan jabatan politik. Coleman menjelaskan adanya interaksi antara aktor dan sumber daya. Masing-masing aktor dapat mengendalikan sumber daya. Baik masyarakat maupun calon kepala daerah dapat mengendalikan jabatan politik. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan siapa calon yang akan terpilih. Sedangkan kepala daerah juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Disinilah kemudian kedua aktor tersebut saling memengaruhi dan membutuhkan untuk mencapai tujuan masing-masing.

Masyarakat dan para calon kepala daerah sama-sama memiliki kepentingan terhadap sumber daya yakni uang dan jabatan politik keduanya sehingga dapat saling memengaruhi. Calon kepala daerah memberikan penawaran yang memberikan keuntungan kepada masyarakat. Disisi lain masyarakat memberikan penawaran berupa dukungan suara untuk memenangkan pasangan calon. Masyarakat dan calon kepala daerah akhirnya terlibat sebuah hubungan untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Sehingga praktik politik uangpun tidak dapat terhindarkan. Hak pilih menjadi sesuatu yang bisa ditukar dengan rupiah. Dengan adanya transaksi tersebut maka kedua aktor ini akan sama-sama mendapatkan sumber daya yang mereka inginkan. Dimana pemilih dalam hal ini akan mendapatkan uang sedangkan calon kepala daerah akan mendapatkan jabatan politik yakni berupa kemenangan dalam Pemilu.

Menurut pengamat politik di lingkungan Kabupaten Magetan Bambang Sulistiyono selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Merdeka Madiun menyatakan:

*Money politic* sangat luar biasa terjadi dalam Pemilu. Masyarakat tidak mau berpartisipasi kalau tidak ada uang. Dalam Pemilu partisipasi masyarakat terbeli. Ketika ada uang ditawarkan maka selesai sudah. Setiap tim sukses turun ke lapangan untuk membagi-bagi uang dengan banyak modus.<sup>21</sup>

Permainan antar aktor dan sumber daya dalam praktik money politik dalam Pemilu sedikitnya diperlihatkan dalam dua hal, yaitu: *Pertama*, Membagi amplop. *Kedua*, memberikan sumbangan bahan material.

Pada akhirnya teori pilihan rasional Coleman telah mampu menjelaskan adanya keterkaitan antara aktor dan sumber daya dalam hubungannya dengan politik uang dalam Pemilu. Rasionalitas masyarakat ternyata telah memberikan pengaruh pada mereka untuk menentukan apakah mereka ikut memilih atau tidak. Uang dianggap sebagai sebuah keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan ketika mereka sudah berkorban waktu dan tenaga untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS. Disisi calon kepala daerah, jabatan politik menjadi sesuatu yang dianggap memberikan keuntungan besar bagi mereka sehingga mereka juga bersedia mengeluarkan ongkos atau biaya untuk bisa mendapatkannya. Namun, teori pilihan rasional Coleman belum bisa memberikan penjelasan mengenai pertimbangan apa yang difikirkan masyarakat sehingga sumber daya begitu penting bagi mereka. Oleh karena itu, permasalahan politik uang tersebut kemudian juga bisa dilihat dari pandangan teori pilihan rasional Antony Downs guna memahami lebih dalam mengenai masalah politik uang itu sendiri.

Antony Downs memberikan penjelasan mengenai adanya keterkaitan antara pemilihan umum dengan teori pilihan rasional. Kehidupan politik saat ini tidak hanya murni dipengaruhi oleh kepentingan politik. Namun sudah lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi di

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bambang Sulistiyono pada 29 November, 2013

dalamnya. Begitu juga dengan PemiluKada, banyak muncul pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang difikirkan oleh masyarakat sebagai pemilih. Seperti yang diungkapkan oleh Antony Downs bahwa pilihan politik banyak ditentukan oleh evaluasi atau kondisi ekonomi, personal maupun kolektif. Masyarakat cenderung akan mempertimbangkan kehidupan ekonomi mereka pada masa pemerintahan sebelumnya, masa pemerintahan sekarang, dan masa pemerintahan yang akan datang.

Kasus ini akan sangat terlihat ketika *incumbent* kembali maju dalam PemiluKada. Majunya kembali pasangan SMS tak bisa membendung datangnya kritik bagi pasangan tersebut di masa pemerintahan sebelumnya. Selama lima tahun menjabat tentunya banyak kritik dari masyarakat. Kritik terhadap permasalahan ekonomi menjadi salah satu permasalahan yang menjadi pertimbangan utama masyarakat untuk kembali memutuskan memilih pasangan tersebut atau tidak.

Kehidupan ekonomi masyarakat pada masa pemerintahan sebelumnya dengan masa pemerintahan saat ini dan masa yang akan datang sangat ditentukan oleh apa yang telah bisa dilakukan oleh pasangan SMS selama lima tahun menjabat pada periode sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Statistik, terjadi peningkatan ekonomi sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2012 sebesar 1,22 %. Data ini seolah memberikan jawaban atas keberhasilan pemerintahan SMS pada masa sebelumnya dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi juga kembali diperkuat dengan adanya data yang menunjukkan adanya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang dihitung selama tiga tahun berturut-turut yakni mulai tahun 2010, 2011, dan 2012. Telah terjadi peningkatan di semua sektor, mulai dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran, keuangan serta jasa.

Dukungan masyarakat tersebut kemudian ditunjukkan dengan kemauan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS. Terpilihnya kembali pasangan SMS dengan perolehan suara 60% dapat dimaknai sebagai kembalinya harapan masyarakat untuk mempercayakan pemerintahan kembali di tangan pasangan SMS. Masyarakat mempertimbangkan akan ada peningkatan ekonomi kembali setelah SMS kembali memimpin. Seperti yang diungkapkan Suyati istri dari Wakil Bupati Magetan yang menyampaikan bahwa “masyarakat banyak yang mendukung kembali majunya SMS sehingga mereka optimis untuk menang. Dan terbukti dengan perolehan suara mereka yang mayoritas mendukung pasangan SMS.”<sup>22</sup>

### **C.3 Capaian Partisipasi Politik**

Peran lembaga sosial dan dorongan politik uang dalam meningkatkan partisipasi politik pada akhirnya telah terjawab dengan adanya keberhasilan jalannya PemiluKada sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPUD. Berdasarkan penghitungan KPUD terlihat dari 553.724 daftar pemilih yang termuat dalam DPT, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya adalah 399.121 atau sebesar 72%. Perolehan tersebut terbagi pada ketiga pasangan calon dengan komposisi perolehan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Suyati pada 22 November 2013

**Tabel 5.3**

**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2013**

No.	Nama pasangan calon	Perolehan suara	Prosentase
1.	Drs. H. Sumantri, MM dan Samsi	227.612	60%
2.	Dra. H. Nanik Karsini, MM dan Drs. H. Sugiho Pramono	116.374	30%
3.	Ir. H. Djoko Prabowo dan H. Hartoto, S.Sos	41.976	10%

Sumber: KPUD Kabupaten Magetan, 2013

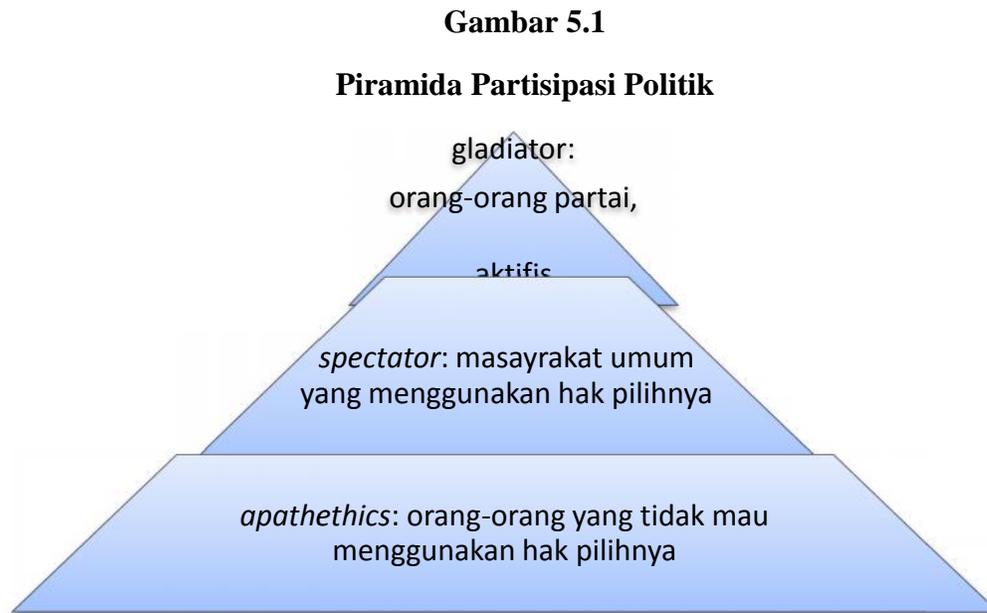
Pemilukada tahun 2013 dimenangkan kembali oleh pasangan *incumbent* yaitu pasangan SMS. Kemenangan SMS mencapai kurang lebih 60%. Sedangkan pasangan berikutnya yang mendapatkan suara terbanyak nomor dua adalah pasangan *independent* Naspro dengan kurang lebih mendapatkan suara sebesar 30%. Selanjutnya yang mendapatkan perolehan suara paling rendah adalah pasangan Jowo-Toto dengan perolehan suara kurang lebih sebesar 10%.

Partisipasi politik dalam Pemilukada tahun 2013 merupakan pencapaian partisipasi politik yang paling tinggi jika dibandingkan dengan Pemilukada sebelumnya. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat sebesar 4%. Tidak banyak daerah-daerah yang bisa mencapai tingkat partisipasi yang mampu menembus angka 70%. Kebanyakan daerah-daerah hanya mampu menembus angka 60%. Bahkan ada di kota-kota besar yang tidak bisa mencapai 60%. Banyak pihak mengakui bahwa masyarakat Magetan cukup aktif dalam menggunakan hak pilihnya. Partai politik, KPUD, masyarakat umum, LSM, sampai kalangan akademisipun mengakui bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat cukup tinggi. Namun demikian, beberapa pihak menilai bahwa pencapaian angka 72% itu tidak bisa menjadi ukuran partisipasi politik masyarakat. Hal itu dikarenakan angka tersebut didapat dari hasil hitung-hitungan dari DPT yang ada. Sedangkan jumlah DPT itu sendiri tidak sesuai dengan jumlah *real* yang ada di masyarakat. Permasalahan DPT memang menjadi masalah yang selalu hadir dalam pemilihan umum.

Tingkat ketidakhadiran di TPS dalam Pemilukada tahun 2013 mencapai 28%. Namun menurut banyak pihak angka ini tidak berarti menunjukkan bahwa 28% masyarakat itu semuanya apatis. Ada banyak alasan yang mengakibatkan orang tidak menggunakan hak pilihnya. *Pertama*, sebagian dari mereka sedang bekerja di luar kota. *Kedua*, banyak mahasiswa yang sedang menempuh studi di luar kota. *Ketiga*, manula yang sudah tidak mungkin bisa datang ke TPS

masih masuk ke daftar DPT. *Keempat*, masyarakat benar-benar apatis. *Kelima*, ada kesibukan yang benar-benar tidak bisa ditingalkan.<sup>23</sup>

Partisipasi politik sendiri telah digolongkan oleh Milbrath dan Goel kedalam sebuah susunan piramida yang terbagi menjadi tiga bagian seperti yang terlihat dalam gambar berikut:



Sumber: Miriam Budiardjo, 2008

Gambar piramida tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang termasuk dalam gladiator adalah mereka terlibat aktif dalam politik dengan jumlah yang sedikit namun memiliki pengaruh yang sangat besar. Sehingga posisi mereka berada paling tinggi. Posisi berikutnya adalah *spectator*. Masyarakat yang ikut menggunakan hak pilihnya, berpartisipasi dengan hanya ditunjukkan dengan memilih pada saat Pemilu. Terakhir adalah masyarakat yang apatis yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Masyarakat Kabupaten Magetan sebagian besar masuk dalam kategori *spectator*. Umumnya mereka bukan aktifis partai. Mereka hanya warga biasa yang menggunakan hak pilihnya ketika Pemilu. Setelah selesai mereka tidak lagi terlibat dalam kegiatan politik apapun.

#### **C.4 Catatan Kritis Teori Pilihan Rasional**

Teori pilihan rasional James S. Coleman, Antony Downs, Friedman dan Hechter telah mampu menjelaskan mengenai pengaruh lembaga sosial dan rasionalitas masyarakat dalam memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Namun demikian teori pilihan rasional tersebut belum mampu menjelaskan bahwasannya dalam partisipasi politik sosok kandidat masih diperhitungkan oleh masyarakat. Uang tidak selalu menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih. Selain itu lembaga sosial juga tidak selalu mampu mendorong masyarakat dalam

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Agus Pada 24 November 2013

meningkatkan partisipasi politiknya. Bahkan lembaga sosial banyak memiliki keterbatasan dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.

Munculnya tiga pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilu 2013 sedikit banyak telah memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Kembali terpilihnya pasangan *incumbent* SMS sebesar 60% memastikan bahwa pasangan inilah yang paling berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Tidak hanya karena keberhasilan pasangan SMS dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Namun pasangan SMS masih dinilai oleh masyarakat merupakan pasangan yang paling dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan pasangan yang lain. Kedua pasangan yang lain yakni pasangan Naspro dan Jowo-Toto keduanya tidak berdomisili di Kabupaten Magetan. Keduanya telah lama tinggal di Kota Jakarta. Pasangan SMS telah melakukan pendekatan dengan masyarakat selama 5 tahun pada masa kepemimpinannya sebelumnya. Pendekatan dilakukan kepada birokrasi, partai politik, ormas, dan juga masyarakat secara langsung. Sehingga pasangan ini dinilai positif oleh masyarakat selama kepemimpinannya. Seperti yang diungkapkan oleh Hananto selaku tim sukses pasangan SMS sekaligus ketua dari organisasi Taruna Merah Putih mengungkapkan:

Pak Mantri itu selama kepemimpinannya tidak banyak membuat kesalahan terhadap masyarakat. Orangnya tidak pendendam. Misalnya saja begini, biasanya bupati yang terpilih itu kan melakukan mutasi terhadap birokrat yang tidak mendukungnya. Kalau Pak Mantri tidak begitu, meskipun ada birokrat yang tidak milih ya tidak pernah diancam mutasi. Sehingga mereka justru sungkan dengan sendirinya sampai akhirnya mendukung kembali pasangan SMS. Tidak hanya itu kepada masyarakatpun beliau akrab. Beliau sering sekali mendatangi acara hajatan nikahan masyarakat. Meski itu masyarakat kelas bawah.<sup>24</sup>

Masyarakat sendiri juga menilai bahwa pasangan SMS masih layak memimpin Magetan sehingga mereka mau kembali mendukung dengan memberikan suaranya pada Pemilu. Selama kepemimpinannya pasangan SMS tercatat tidak pernah melakukan pelanggaran secara hukum. Dengan programnya yang terkenal dengan sebutan : "Ditata Indah Plus Insani" (Pendidikan, Pertanian, Pariwisata, Industri, Perdagangan, dan Kesehatan serta didukung dengan bidang Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan) pasangan SMS mampu merebut kembali hati rakyat.

Selain pasangan *incumbent*, munculnya *independent* juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat. Pasangan Naspro sebagai pasangan *independent* telah mampu merebut hati rakyat sebesar 30%. Munculnya pasangan *independent* seolah memberikan pilihan lain bagi masyarakat yang anti terhadap partai politik. Kemunculan calon *independent* merupakan pertama kalinya dalam Pemilu di Kabupaten Magetan. Meskipun pasangan ini tidak memenangkan Pemilu. Namun pasangan ini telah mampu mengalahkan pasangan Jowo-Toto yang diusung oleh Partai Demokrat. Kemenangan *independent* atas pasangan dari partai politik ini dapat dijadikan renungan bersama partai politik.

Pasangan Naspro mampu merebut hati rakyat dengan banyak melakukan kampanye dengan cara blusukan. Pasangan Naspro sering sekali menghadiri hajatan nikahan dan kematian warga masyarakat. Seperti yang terlihat pada bulan Oktober tahun 2013 lalu, pasangan Naspro

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Hananto pada 23 November 2013

tampak selalu hadir dalam setiap acara nikahan wara di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan. Ibu Nanik sebagai calon Bupati juga kerap tampil diatas panggung pada acaa hajatan-hajatan warga. Sehingga warga merasa kenal dekat dengan Ibu Nanik.

Pasangan Naspro juga menawarkan program pelatihan pengembangan masyarakat melalui program peternakan kelinci dan petani jamur di Desa Terung Kecamatan Panekan. Dalam membimbing masyarakat, Ibu Nanik sering mengunjungi langsung dan memberikan motivasi terhadap para pemuda desa agar mau mengembangkan kreatifiats di bidangnya masing-masing. Ibu Nanik bersedia memberikan modal usaha dan pelatihan kepada masyarakat. dengan cara itu padangan Naspro mampu meraih hati rakyat.

Pengaruh figur pasangan calon dan visi misinya ternyata masih mampu memengaruhi masyarakat dalam partisipasi politik. Tidak hanya lembaga sosial dan juga uang yang berperan dalam partisipasi politik masyarakat. Namun demikian masyarakat juga memiliki pertimbangan terhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri dalam Pemilu. Walaupun hanya sedikit masyarakat saat ini yang memperhitungkan sosok figur dan visi misi pasangan calon tidak lantas hal tersebut diabaikan. Sedikit banyak hal ini masih memiliki pengaruh terhadap pilihan masyarakat untuk menentukan apakah akan menggunakan ak pilihnya ke TPS atau tidak.

## **D. PENUTUP**

### **D.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: *Pertama*, upaya meningkatkan partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah Pemilu. Friedmen dan Hechter melihat adanya pengaruh lembaga sosial dalam partisipasi politik. Dalam temuan peneliti terdapat empat lembaga sosial yang turut berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakat. *Kedua*, Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Kabupaten Magetan Tahun 2013 telah terjadi peningkatan. Partisipasi politik masyarakat mampu mencapai angka 72%.

Tingkat partisipasi politik masyarakat ternyata dipengaruhi oleh adanya praktik politik uang menjelang Pemilu. Terjadinya politik uang dikarenakan saat ini masyarakat mulai dipengaruhi oleh pemikiran yang rasional dalam memandang partisipasi politik. Praktik politik uang dalam partisipasi politik telah mampu dijelaskan melalui teori pilihan rasional J.S. Coleman dan Antony Downs. Dari hasil penelitian tersebut terbukti masyarakat memiliki pemikiran yang sangat rasional dalam Pemilu. Dorongan uang dalam Pemilu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat. Namun teori pilihan rasional Coleman dan Dawsn tidak banyak menjelaskan adanya pengaruh tingkat pendidikan dalam memengaruhi pemikiran rasional seseorang. Selain itu teori pilihan rasional Downs terlalu rumit dalam menjelaskan tentang pengaruh kehidupan ekonomi masyarakat dalam menentukan partisipasi politik. Pada intinya masyarakat akan menentukan untuk berpartisipasi ketika partisipasi tersebut memberikan keuntungan secara nyata kepada dirinya.

### **D.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai partisipasi politik. maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan baik bagi para

pembaca, pemerintah, maupun para praktisi politik. *Pertama*, masyarakat harus terus meningkatkan kesadarannya akan pentingnya partisipasi dalam politik. Partisipasi politik dalam Pemilu akan menentukan pemimpin yang akan turut menentukan nasib masyarakat selama lima tahun. *Kedua*, partai politik seharusnya meningkatkan perannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. *Ketiga*, para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya melakukan kampanye dengan cara-cara yang lebih inovatif dan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. *Keempat*, *civil society* seharusnya memaksimalkan pergerakannya kepada masyarakat. *Kelima*, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press
- BPS Kabupaten Magetan, 2013. *Kabupaten Magetan Dalam Angka*. Magetan: Badan Pusat Statistik
- Creswell, John. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Faulks, Keith. 2010. *Sosiologi Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Haboddin, Muhtar dan Gregorius Sahdan (ed). 2009. *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia*. Yogyakarta: IPD
- Hendry. 2013. *Pemiludan Kisah Perjalanan 2 Roh*. Malang: Media center KPU Kota Malang
- Horizon, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Mujani, Saiful, dkk . 2012. *Kuasa Rakyat*. Jakarta: Mizan Publika
- Marsh, David & Gerry Stoker. 2010. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM
- Prihatmoko, Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ritzer, George-Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- Salim, Agus. 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press  
Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia  
Surbakti, Ramlan. 1997. *Partai Pemilu dan Demokrasi* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar

**Wawancara:**

Wawancara dengan Susilo Wardoyo. S.Pd Sekretaris PDIP Magetan pada 18 November 2013

Wawancara dengan Siswo Laksono, S.Sos selaku Staf KPUD Kabupaten Magetan pada 28 November 2013

Wawancara dengan Sudino ketua DPCPBB Magetan pada 18 November 2013

Wawancara dengan Udin selaku wakil ketua DPD PAN Magetan pada 19 November 2013

Wawancara dengan Sugiyanto selaku tokoh masyarakat pada 19 November 2013

Wawancara dengan Sekretaris Desa Temboro Muh. Syafi pada 19 November 2013

Wawancara dengan Mansyur selaku ketua NU Magetan pada 19 November 2013

Wawancara dengan Hananto ketua organisasi Taruna Merah Putih pada 20 November 2013

Wawancara dengan M. Ramzi wartawan JTV pada 20 November 2013

Wawancara dengan Didik wartawan Jawa Pos pada 20 November 2013

Wawancara dengan Joko Siswanto Ketua Panwaslu pada 20 November 2013

Wawancara dengan Supriyanto selaku komisioner Panwaslu pada 21 November 2013

Wawancara dengan Luhung selaku Sekretaris KPUD pada 21 November 2013

Wawancara dengan Beny Ardi ketua LSM Magetan Center pada 21 November 2013

Wawancara dengan Bowo selaku sekretaris DPD Partai Golkar pada 22 November 2013

Wawancara dengan Nurwahid selaku anggota DPRD fraksi PKB pada 22 November 2013

Wawancara dengan Tari selaku masyarakat pada 23 November 2013

Wawancara dengan Nanang Sapto Aji ketua Dewan pimpinan cabang Reptem (Relawan Perjuangan Demokrasi) pada 23 November 2013

Wawancara dengan Suyati S.Pd selaku istri Wakil Bupati sekaligus ketua Dewan urusan peranan perempuan partai PDIP pada 23 November 2013

Wawancara dengan Bambang Sulistiyono M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Universitas Merdeka Madiun pada 29 November 2013